



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIRIBON**

**Jl. Sunan Ampel No. 1 Telp. (0231) 321431
S U M B E R**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 disusun sebagai bentuk Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Program Kerja Tahun 2023.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Harapan kami Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sumber, 20 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641014 198503 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	4
2.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.....	4
2.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	5
BAB III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	9
3.1. Program.....	9
3.2. Kegiatan.....	9
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN- LAMPIRAN	11



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah.....	4
Tabel 2	Capaian Realisasi Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022.....	4
Tabel 3	Rincian Target Dan Realisasi Capaian Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022.....	4
Tabel 4	Realisasi Jenis Belanja Tahun 2022	6
Tabel 5	Realisasi Belanja Operasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022	7
Tabel 6	Realisasi Belanja Modal Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022.....	8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, disesuaikan dengan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yaitu "Terwujudnya Progresifitas Pajak Daerah Sebagai Andalan Pendapatan Daerah", sedangkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yaitu "Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Pajak Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Wajib Pajak Daerah".

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



1.3. Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 49, Seri D)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

2.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Pencapaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran, yaitu meningkatnya penerimaan pajak daerah dan meningkatnya pelayanan pajak daerah.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan berdasarkan indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2022.

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (%)	KATEGORI/ KET
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	14.66	16.23	110.71	Tercapai
2	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82.64	82.69	100.06	Tercapai

Rincian target dan realisasi capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Capaian Realisasi Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

NO	IKK	TARGET	RUMUS / FORMULASI	JENIS DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	14,66%	$\frac{308,442,409,838 - 263,053,751,571}{263,053,751,571} \times 100 = 17.25$	- Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022, sebesar Rp. 308.442.409.838,- - Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021, sebesar Rp. 263.053.751.571
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,64 Poin	Dilakukan survei IKM melalui kuesioner yang disebar berjumlah 207 kuesioner kepada wajib pajak daerah diperoleh nilai 82,69 Poin dengan Predikat B (Baik)	Laporan IKM Tahun 2022



Tabel 3
Rincian Target Dan Realisasi Capaian Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Peningkatan Realisasi dari 2020-2021
		Target	Realisasi	%	%
Pajak Daerah	263,053,751,571	278,528,660,262	308,442,409,838	110.74	17.25
Pajak Hotel	6,638,514,949	9,000,000,000	9,569,104,488	106.32	44.15
Pajak Restoran	18,563,182,763	23,670,052,000	26,581,166,308	112.30	43.19
Pajak Hiburan	597,656,735	1,980,000,000	1,991,481,114	100.58	233.21
Pajak Reklame	5,903,071,563	5,238,399,000	5,928,785,953	113.18	0.44
Pajak Penerangan Jalan	76,683,134,682	96,125,000,000	101,233,686,465	105.31	32.02
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14,626,902,415	11,387,124,000	12,220,204,300	107.32	-16.45
Pajak Parkir	555,515,728	650,000,000	809,182,579	124.49	45.66
Pajak Air Tanah	1,737,591,849	3,200,000,000	3,965,595,432	123.92	128.22
Pajak Sarang Burung Walet	57,746,000	40,000,000	41,571,000	103.93	-28.01
Pajak Bumi dan Bangunan	55,258,242,024	57,563,640,000	67,189,399,552	116.72	21.59
Pajak BPHTB	82,432,192,863	69,674,445,262	78,912,232,647	113.26	-4.27

Penerimaan pajak daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 308,442,409,838.- atau mencapai 110.74% dari target yang ditetapkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 278,528,660,262,-. Sedangkan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 17,25 %. Prosentase peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 ada kenaikan dari tahun sebelumnya disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 melandai sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi mulai membaik.

2.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp 26.405.528.523,00 sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 25.043.823.741,00 yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.



Tabel 4
Realisasi Jenis Belanja Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Operasi	25,802,281,033	24,452,510,051	94.77
Belanja Modal	603,247,490	591,313,690	98.02
Jumlah Belanja Daerah	26,405,528,523	25,043,823,741	94.84

Anggaran belanja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan struktural dan fungsional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Daftar anggaran dan realisasi belanja operasi dan belanja modal tahun 2022 dapat dilihat tabel berikut ini:



Tabel 5
Realisasi Belanja Operasi
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A.	BELANJA OPERASI	25,802,281,033	24,452,510,051	94.77
1.	Belanja Pegawai	4,443,855,800	4,259,459,474	95.85
	- Gaji Pokok ASN	3,256,849,000	3,156,932,708	96.93
	- Tunjangan Keluarga ASN	334,495,000	323,469,922	96.70
	- Tunjangan Jabatan ASN	209,250,000	198,450,000	94.84
	- Tunjangan Fungsional ASN	94,414,000	55,160,000	58.42
	- Tunjangan Fungsional Umum ASN	107,560,000	105,070,000	97.69
	- Tunjangan Beras ASN	202,204,000	196,403,040	97.13
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	76,863,800	66,371,362	86.35
	- Pembulatan Gaji ASN	48,000	42,709	88.98
	- Iuran Jaminan Kesehatan ASN	135,366,000	131,605,874	97.22
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6,702,000	6,488,432	96.81
	- Iuran Jaminan Kematian ASN	20,104,000	19,465,427	96.82
2.	Tambahan Penghasilan PNS	2,135,900,000	2,101,083,750	98.37
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1,815,130,000	1,787,340,000	98.47
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	238,740,000	238,140,000	99.75
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	82,030,000	75,603,750	92.17
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11,377,842,446	10,809,587,870	95.01
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemugutan Pajak Daerah	11,372,597,446	10,807,992,870	95.04
	- Belanja Honorarium	5,245,000	1,595,000	30.41
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	461,596,190	441,695,151	95.69
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemugutan Pajak Daerah	461,596,190	441,695,151	95.69
5	Belanja Barang	1,715,388,642	1,595,515,643	93.01
	- Belanja Barang Pakai Habis	1,715,388,642	1,595,515,643	93.01



Tabel 6
Realisasi Belanja Modal
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE %
A.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	603.247.490	591.313.690	98,02
1.	Belanja Modal Alat Angkutan	63.501.900	63.450.000	99,92
	a. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor	63.501.900	63.450.000	99,92
2.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	107.266.620	96.175.120	89,66
	a. Belanja Modal Alat Kantor	30.606.000	23.350.000	76,29
	b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga	72.677.520	68.925.120	94,84
	c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.983.100	3.900.000	97,91
3.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.214.870	4.214.870	100,00
	a. Belanja Modal Alat Kedokteran	4.214.870	4.214.870	100,00
4.	Belanja Modal Komputer	428.264.100	427.473.700	99,82
	a. Belanja Modal Komputer Jaringan	361.442.400	360.652.000	99,78
	b. Belana Modal Personal Komputer	66.821.700	66.821.700	100,00

BAB III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

3.1. Program

Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan sasaran tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 3,88 pada setiap instansi pemerintahan daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah, maka ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 ada 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2. Kegiatan

Dari program-program tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Kegiatan:

- a. Kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja ini merupakan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Cirebon **"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"**.

Agar rencana kerja ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Sumber, Januari 2023

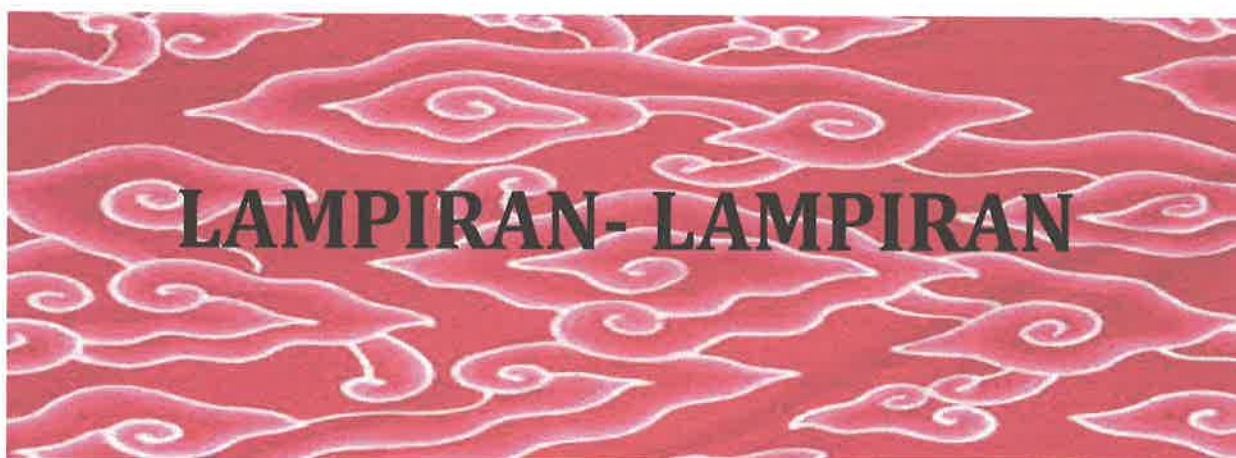
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641014 198503 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01 Telp/Fax. : (0231) 321431

Website <https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 602/Sekret/Kep. /Bapenda

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan Focus Grup Discussion (FGD) di Internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023**

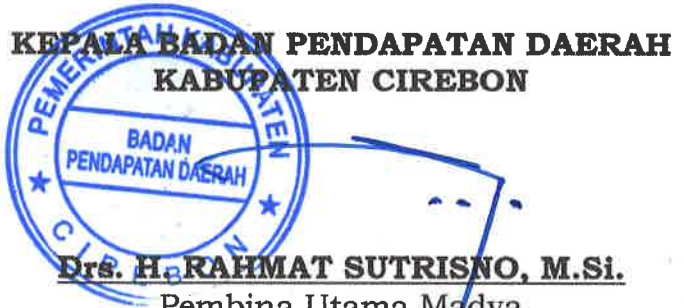
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kerja tahunan, Menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada Tanggal : 20 Januari 2023



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19641014 198503 1 004

**RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Ket
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase	11,23	10,37	14,84	17,64	14,66	16,23	14,66		14,66		
2	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,28	82,30	82,46	82,48	82,64	82,69	82,82		83,00		

Sumber, 20 Januari 2023



 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN CIREBON

Drs. H. RAHMAT SUTRISMO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19641014 198503 1 004

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**

SASARAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SASARAN STRATEGIS

: BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
: KE 4 (EMPAT)

SASARAN STRATEGI														
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH														
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PER BULAN (%)												TARGET PER TAHUN (%)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Prosentase Peningkatan Penerimaan Daerah	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	14.66
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.82	82.82

Sumber, 20 Januari 2023



TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2022		%	TARGET TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI		
	Pajak Daerah	278,528,660,262	308,442,409,838	110.74	323,119,197,100
1.	Pajak Hotel	9,000,000,000	9,569,104,488	106.32	7,970,486,706.00
2.	Pajak Restoran	23,670,052,000	26,581,166,308	112.30	22,212,100,000
3.	Pajak Hiburan	1,980,000,000	1,991,481,114	100.58	1,696,600,000
4.	Pajak Reklame	5,238,399,000	5,928,785,953	113.18	6,636,978,293
5.	Pajak Penerangan Jalan	96,125,000,000	101,233,686,465	105.31	96,728,000,000
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11,387,124,000	12,220,204,300	107.32	17,585,546,378
7.	Pajak Parkir	650,000,000	809,182,579	124.49	644,053,246
8.	Pajak Air Tanah	3,200,000,000	3,965,595,432	123.92	3,931,987,671
9.	Pajak Sarang Burung Walet	40,000,000	41,571,000	103.93	68,796,000
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	57,563,640,000	67,189,399,552	116.72	65,429,169,624
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	69,674,445,262	78,912,232,647	113.26	100,215,479,182

Sumber, 20 Januari 2023


 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19641014 198503 1 004

4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	V			V	V	V	V	V	V				
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
10	Penagihan Pajak Daerah	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	V		V	V		V	V				

OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)														
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Terlaksananya Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA, DPPA dan Rencana Strategis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,398,800	6,931,000						1,192,800					630,000		
Terlaksananya Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA, DPPA dan Rencana Strategis			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								3,397,200							
Terlaksananya Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA, DPPA dan Rencana Strategis			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										4,573,200					
Terlaksananya Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA, DPPA dan Rencana Strategis			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													4,686,000		
Terlaksananya Dokumen Rencana Kerja, RKA, DPA, DPPA dan Rencana Strategis			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD												3,973,200			
Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP dan Laporan Rutin Bulanan			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,391,000	2,826,000													
Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	576,600			2,172,600						1,736,400				522,000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,204,692,000							8,803,127,000					
Terlaksananya Penatausahaan dan verifikasi keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55,500			55,500	55,500	679,500	55,500	55,500	991,500	55,500	55,500	55,500	55,500	328,200			
Terlaksananya Rekonsiliasi Akuntansi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	51,000			51,000	1,401,000	51,000	51,000	51,000	51,000	951,000	51,000	51,000	51,000	313,200			
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,712,200																
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran										3,751,200							
Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,077,032	1,213,563	1,213,563	709,179	709,179	709,179	778,221	100,344	100,344	709,179	709,179	709,179			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213,701,640														
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,738,812	3,548,115	3,319,566	3,319,566	3,286,599	3,286,599	2,956,485	2,906,313	521,256	562,992	355,422	378,288			
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Foto Copy)			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,309,797	4,309,797	4,309,797	4,309,797	3,725,604	3,725,604	3,903,426	3,369,960	3,369,960	3,369,960	2,754,798	2,329,779			
Tersedianya Bahan Bacaan Media Cetak lokal dan regional			Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,841,500	3,841,500	3,841,500	5,841,500	3,841,500	3,841,500	5,341,500	3,841,500	3,841,500	5,341,500	3,841,500	3,841,500			
Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan			Penyediaan Bahan/Material	46,541,037	17,260,870	13,814,431	31,697,308	13,699,213	15,439,138	30,136,981	15,386,746	12,038,320	19,459,336	7,491,427	7,015,015			

OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tersedianya Fasilitas Kunjungan tamu			Fasilitas Kunjungan Tamu	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,075,000	3,170,000		
Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,661,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	375,000		
Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Yang Handal			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							13,136,120						
Jumlah jenis tagihan rekening		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,650,000	23,650,000	23,650,000	23,650,000	23,650,000	23,650,000	23,650,000	23,650,000	19,999,696	3,650,000	4,250,000		
Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	29,816,500	9,805,000	9,805,000	9,805,000	10,805,000	9,805,000	12,571,000	9,805,000	9,805,000	9,805,000	15,520,000	9,805,000	
Jumlah Surat Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Sah			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,251,500	7,380,500	7,380,500	27,710,500	7,380,500	7,380,500	9,335,500	7,380,500	7,380,500	7,710,500	8,080,500	7,554,500	
Terpeliharanya Gedung/Kantor			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111,248,050	23,479,050	23,479,050	23,479,050	23,479,050	23,479,050	54,079,050	23,479,050	23,479,050	23,479,050	23,479,050	110,479,050	
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung/Kantor dan Genset			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174,000	174,000	883,500	174,000	174,000	883,500	174,000	174,000	883,500	174,000	174,000	174,000	
Terlatihnya Wajib Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	4,654,000	15,232,000	3,154,000	1,654,000	13,732,000	4,654,000	5,279,000	4,654,000	3,831,800	8,101,600	2,674,800	4,654,000	
Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	32,050,000	5,850,000	600,000	250,710,300	600,000	35,063,200							30
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Tentang Pajak Daerah			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	66,322,200			58,906,700	25,042,500	13,243,500	8,093,232	14,263,500	900,000	900,000	900,000	900,000	5,278,050
Terlaksananya Sosialisasi Rutin			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4,857,050	4,857,050	17,363,050	54,460,550	4,857,050	4,043,050	75,730,550	2,457,050	4,857,050	2,457,050	5,874,150	2,457,050	
Pemutakhiran Basis Data CWP Hasil Penjaringan dan Data Potensi 6 Jenis Pajak Daerah			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	28,995,075	9,783,163	11,439,523	14,488,883	9,337,247	10,837,247	14,355,683	9,248,225	9,398,585	16,156,710	9,973,383	9,366,632	
Tercapainya Penerimaan Pajak BPHTB			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	223,252,770	12,696,000	9,216,000	9,216,000	9,216,000	9,216,000	209,060,400	9,216,000	9,216,000	181,030,014	9,216,000	9,216,000	
Tersusunnya Laporan 5 Jenis Pajak			Penetapan Wajib Pajak Daerah	14,013,000	6,810,000	6,810,000	15,165,750	6,813,000	6,810,000	6,852,000	6,852,000	6,852,000	6,852,000	6,852,000	6,852,000	
Tersedianya Pelayanan dan konsultasi pajak daerah			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4,347,000			2,900,000	2,900,000	3,300,000	3,300,000	3,700,000	3,700,000				
Tersusunnya Monitoring Penerimaan dan Piutang Pajak Daerah Secara Periodik			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	6,055,850	337,142,000	4,808,000	338,389,850	4,808,000	4,808,000	6,055,850	4,808,000	935,343,000	6,055,850	4,808,000	4,808,000	
Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah			Penagihan Pajak Daerah	8,005,500	7,758,000	7,758,000	8,005,500	7,758,000	7,758,000	8,005,500	7,608,000	7,608,000	7,855,500	5,308,000	3,308,000	
Terfasilitasinya Pengaduan Permasalahan Wajib Pajak			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	405,000			1,305,000	12,150,000	13,500,000	9,105,000	15,150,000		9,404,700	18,150,000		
Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	16,402,000	49,177,000	49,177,000	446,395,180	44,677,000	32,677,000	32,677,000	32,677,000	32,677,000	16,402,000	21,202,000	16,402,000	
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		6,000,000	13,802,200		6,000,000	13,802,200		6,000,000	13,802,200		6,000,000	13,727,800	

OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII



Sumbar Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Peninjau Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01 Telp/Fax. : (0231) 321431

Website <https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : Januari 2023
Nomor : 900 / 41 /Sekret/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023**

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta pencapaian target kinerja jangka menengah, seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Cirebon perlu Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN).

Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan permohonan penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19641014 198503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen
1.1.02.	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Hasil Survey	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82.82 Poin

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.443.570.082,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.706.620.911,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PAD,Pjk Pen Jln,Pjk Pen Jln, Pjk Restoran,Pjk Restoran
J U M L A H		28.150.190.993,00	

Pihak Kedua
 BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, Januari 2023
 Pihak Kesatu
 Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19641014 198503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURATMO, S.Sos.,M.Si.
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004


SURATMO, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19660524 198703 1 006



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.02.	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Hasil Survey	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82.82 Poin

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase jumlah layanan yang dilaksanakan sesuai SOP	$\frac{(\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur})}{(\text{Total Unsur Yang Terisi})} \times \text{Nilai Penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat		100 prosen	23.706.620.911,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PAD,Pjk Pen Jln, Pjk Restoran
J U M L A H								23.706.620.911,00	

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Sumber, Januari 2023
Pihak Kesatu
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,

SURATMO, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19660524 198703 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDA NURMALA, SAP.
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : SURATMO, S.Sos.,M.Si.
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

SURATMO, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19660524 198703 1 006

IDA NURMALA, SAP.
Penata Tk.I
NIP. 19661110 200112 2 002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.02.	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Hasil Survey	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82.82 Poin

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.706.620.911,00	
1.1.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	38.006.800,00	Sumber Dana:
1.1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	11.152.600,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.397.200,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	4.573.200,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4.686.000,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	3.973.200,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	5.217.000,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.007.600,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Pelaporan dan Gaji Pegawai	100 Prosen	22.023.798.800,00	Sumber Dana:
1.1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 pegawai	22.007.819.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PAD
1.1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	2.443.200,00	Sumber Dana: Pjk Restoran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 laporan	3.073.200,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	6.712.200,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	3.751.200,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpeliharanya Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	6 aplikasi	670.653.015,00	Sumber Dana:
1.1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	9.738.141,00	Sumber Dana: Pjk Pen Jln, Pjk Restoran
1.1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	213.701.640,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	29.180.013,00	Sumber Dana: Pjk Pen Jln, Pjk Restoran
1.1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	43.788.279,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	52.098.000,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	229.979.822,00	Sumber Dana: Pjk Pen Jln, Pjk Restoran
1.1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	36.995.000,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.036.000,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dok	13.136.120,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kebutuhan kantor	100 Prosen	220.749.696,00	Sumber Dana:
1.1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	220.749.696,00	Sumber Dana: Pjk Pen Jln
1.1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sesuai standar pelayanan Prima	100 Prosen	753.412.600,00	Sumber Dana:
1.1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	147.152.500,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	114.926.000,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	487.117.600,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi	95 unit	4.216.500,00	Sumber Dana: Pjk Restoran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J U M L A H				23.706.620.911,00	

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,

SURATMO, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19660524 198703 1 006

Sumber, Januari 2023
Pihak Kesatu
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat,


IDA NURMALIA, SAP.
Penata Tk.I
NIP. 19661110 200112 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PADI SUPRIYATNA, S.IP.
Jabatan : Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : FAHMI SUDJATI, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

FAHMI SUDJATI, SH.
Pembina

NIP. 19800514 200604 1 015

PADI SUPRIYATNA, S.IP.
Penata

NIP. 19770207 199903 1 003



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			699.767.184,00	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	699.767.184,00	Sumber Dana:
1.1.01.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Dok	699.767.184,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
J U M L A H				699.767.184,00	

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



FAHMI SUDJATI, SH
Pembina

NIP. 19800514 200604 1 015

Sumber, Januari 2023
Pihak Kesatu
Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan
BPHTB pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



PADI SUPRIATNA, S.IP.
Penata

NIP. 19770207 199903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DADI JUHANDI, SE.,MM.
Jabatan : Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : FAHMI SUDJATI, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

FAHMI SUDJATI, SH.
Pembina
NIP. 19800514 200604 1 015

DADI JUHANDI, SE.,MM.
Penata Tk.I
NIP. 19860626 201001 1 010



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			275.061.106,00	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	275.061.106,00	Sumber Dana:
1.1.01.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	153.380.356,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.01.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	97.533.750,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.01.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Dokumen	24.147.000,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
J U M L A H				275.061.106,00	

Pihak Kedua
 Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,

FAHMI SUDJATI, SH.
 Pembina
 NIP. 19800514 200604 1 015

Sumber, Januari 2023
 Pihak Kesatu
 Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,


DADI JUHANDI, SE.,MM.
 Penata Tk.I
 NIP. 19860626 201001 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHMI SUDJATI, SH.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004


FAHMI SUDJATI, SH.
Pembina
NIP. 19800514 200604 1 015



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	974.828.290,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
J U M L A H								974.828.290,00	

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Sumber, Januari 2023
Pihak Kesatu
Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,

FAHMI SUDJATI, SH.
Pembina
NIP. 19800514 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004


H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE., M.Si.
Pembina
NIP. 19840409 200902 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	2.693.472.680,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
J U M L A H								2.693.472.680,00	

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Sumber, Januari 2023
Pihak Kesatu
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE., M.Si.
Pembina
NIP. 19840409 200902 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILI MURTIASIH, S.IP.
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.

Pembina
NIP. 19840409 200902 1 001

LILI MURTIASIH, S.IP.

Penata
NIP. 19800523 200701 2 007




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1.737.024.800,00	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	1.737.024.800,00	Sumber Dana:
1.1.01.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	800000 Dokumen	1.657.890.400,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.01.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	79.134.400,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
J U M L A H				1.737.024.800,00	

Pihak Kedua
 Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,


H. DMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.
 Pembina
 NIP. 19840409 200902 1 001

Sumber, Januari 2023
 Pihak Kesatu
 Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda,


LILI MURTIASIH, S.IP.
 Penata
 NIP. 19800523 200701 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. TAUFIK AKBAR, SH, M.Si.
Jabatan : Kepala Subbidang Penagihan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.

Pembina
NIP. 19840409 200902 1 001

MOH. TAUFIK AKBAR, SH, M.Si.

Pembina
NIP. 19860526 200902 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n)} - \text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			165.905.700,00	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	165.905.700,00	Sumber Dana:
1.1.01.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan, Pajak Daerah	12 Dokumen	86.736.000,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.01.04.2.01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 Dokumen	79.169.700,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
J U M L A H				165.905.700,00	

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.
Pembina
NIP. 19840409 200902 1 001

Sumber, Januari 2023
Pihak Kesatu
Kepala Subbidang Penagihan pada Bidang Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan,

MOH. TAUFIK AKBAR, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19860526 200902 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANJI ANOM, S.H.
Jabatan : Kepala Subbidang Pemeriksaan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si.
Pembina
NIP. 19840409 200902 1 001

PANJI ANOM, S.H.
Penata Tk.I
NIP. 19860715 201001 1 005



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			790.542.180,00	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	790.542.180,00	Sumber Dana:
1.1.01.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	790.542.180,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
J U M L A H				790.542.180,00	

Pihak Kedua
 Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19840409 200902 1 001

Sumber, Januari 2023
 Pihak Kesatu
 Kepala Subbidang Pemeriksaan pada Bidang
 Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

PANJI ANOM, S.H.
 Penata Tk.I
 NIP. 19860715 201001 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,


Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004


NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.
Pembina
NIP. 19801130 200501 2 011



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

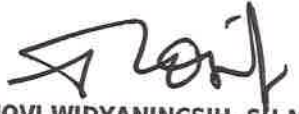
No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
			Rumus	Tipe	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen	775.269.112,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
J U M L A H								775.269.112,00	

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Sumber, Januari 2023
Pihak Kesatu
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan,


NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.
Pembina
NIP. 19801130 200501 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BELLY, ST., MM.
Jabatan : Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.
Pembina
NIP. 19801130 200501 2 011

BELLY, ST., MM.
Pembina
NIP. 19790701 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARI FITRIA, S.Kom.
Jabatan : Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan pada Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i.

Pembina

NIP. 19801130 200501 2 011

SARI FITRIA, S.Kom.

Penata Tk.I

NIP. 19830705 200604 2 022



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Realisasi Pajak Daerah per Tahun	14.66 Prosen
1.1.01.	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n)} - Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}}{Realisasi\ Pajak\ Daerah_{(n-1)}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat		14.66 Prosen

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.01.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			518.723.212,00	
1.1.01.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100 Prosen	518.723.212,00	Sumber Dana:
1.1.01.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	324.873.530,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
1.1.01.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	193.849.682,00	Sumber Dana: Pjk Restoran
J U M L A H				518.723.212,00	

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan,


NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.I.
Pembina
NIP. 19801130 200501 2 011

Sumber, Januari 2023
Pihak Kesatu
Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan
pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan,


SARI FITRIA, S.Kom.
Penata Tk.I
NIP. 19830705 200604 2 022